



APBN 2015 DAN TANTANGAN FISKAL PEMERINTAHAN BARU

Izzaty*)

Abstrak

APBN Tahun 2015 yang sudah disepakati Pemerintah dan DPR masih bersifat baseline, ruang fiskal terbatas dan subsidi yang besar. Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dapat menstimulus perekonomian masih minim. Menyikapi hal tersebut, Pemerintahan Jokowi harus melakukan reformasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan ekonomi global yang cukup berat. Untuk itu, Pemerintahan Jokowi dapat segera menyusun RPJMN 2015-2019 dan mengajukan APBN Perubahan 2015 pada awal tahun 2015.

Pendahuluan

Pemerintah dan DPR telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 berupa pendapatan sebesar Rp1.793,6 triliun, belanja sebesar Rp2.039,5 triliun, dan defisit anggaran mencapai Rp245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Asumsi makro ekonomi yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Pendapatan negara dalam APBN Tahun 2015 sebesar Rp1.793,5 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp410,3 triliun serta hibah sebesar Rp3,2 triliun. Sementara itu, belanja negara sebesar Rp2.039,5 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.392,4 triliun dan dana transfer ke daerah serta dana desa

sebesar Rp647,1 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/ Lembaga Rp647,3 triliun dan belanja non Kementerian/ Lembaga Rp745,1 triliun.

Asumsi Makro Ekonomi APBN Tahun 2015

Uraian	APBN 2015
Pertumbuhan Ekonomi(%)	5,8
Inflasi(%)	4,4
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	6
Nilai Tukar(Rp/US\$)	11.900
Harga Minyak(US\$/barell)	105
Lifting Minyak(ribu barell/hari)	900
Lifting Gas(ribu barell setara minyak/hari)	1.248

Sumber : RUU APBN Tahun 2015.

*) Peneliti Muda Ekonomi Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI. E-mail : izzatym@yahoo.com.



APBN Tahun 2015 disusun oleh pemerintahan SBY untuk dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. APBN Tahun 2015 memiliki substansi pokok meliputi anggaran bersifat *baseline* karena bersifat transisional, defisit anggaran yang rendah, dan persiapan antisipasi ruang fiskal untuk mengakomodasi kebijakan pemerintahan baru. Sayangnya dalam APBN 2015 ini pagu subsidi energi sebesar Rp344,7 triliun (17 persen dari total anggaran) lebih besar dari APBN Tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp282,1 triliun. Dalam APBN-P 2014 besaran subsidi energi meningkat menjadi sebesar Rp392,1 triliun akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan konsumsi BBM bersubsidi meningkat. Sementara pada APBN Tahun 2015 dana infrastruktur mengecil hanya sebesar Rp196 triliun dibandingkan pada APBN Tahun 2014 yang sebesar Rp206,6 triliun. Selain itu, Pemerintah SBY juga mewariskan beban subsidi BBM 2014 senilai Rp45 triliun yang harus dibayarkan pada tahun 2015. Artinya bahwa APBN Tahun 2015 masih sedikit memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK

Pengelolaan APBN memerlukan kedisiplinan dan kehati-hatian yang tinggi melalui pengalokasian dan penggunaan anggaran secara efisien, tepat guna dan tepat manfaat apalagi saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian. Tantangan utama adalah angka inflasi yang tinggi dan normalisasi moneter dunia berupa rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat sebesar 100 poin tahun 2015 yang tentu saja akan berdampak pada perekonomian nasional.

APBN 2015 terkendala dengan ruang gerak fiskal yang terbatas, padahal ruang gerak fiskal yang memadai diperlukan untuk melakukan 'manuver' menghadapi gejolak ekonomi dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. APBN 2015 dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh Jokowi (7 persen) apabila APBN menstimulus pertumbuhan ekonomi yang dicirikan dengan besarnya belanja modal yang salah satunya berupa pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah baru juga harus melakukan reformasi birokrasi, reformasi tata-kelola logistik nasional, dan reformasi semua perizinan termasuk usaha.

Pemerintahan Jokowi juga perlu mengakomodasi empat kebijakan yang telah disepakati oleh pemerintah saat ini dan DPR ke dalam APBN 2015, yaitu *pertama*, adanya efisiensi anggaran subsidi energi yang didukung kebijakan alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran, mengurangi penggunaan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap, serta mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. *Kedua*, mendukung pencapaian sarana pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui dukungan pembangunan konektivitas nasional, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing ketenagakerjaan.

Ketiga, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), termasuk peningkatan kualitas dan efisiensi belanja. *Keempat*, alokasi dana desa sejalan dengan amanat UU No.4 Tahun 2014 sebagai stimulus dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efisien dan efektif, serta sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Pemerintahan Jokowi harus segera mengajukan APBN-Perubahan 2015 pada awal tahun 2015, dan akan mulai dibahas bersama DPR setelah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019. Hal yang sama yang pernah dilakukan Presiden SBY saat awal menjabat pada tahun 2005.

APBN-Perubahan 2015 harus berisikan program pemerintahan Jokowi yaitu pengarusutamaan pembangunan maritim, alokasi dana desa sesuai dengan perintah undang-undang, reforma agraria, mitigasi liberalisasi perdagangan khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan desain skema jaminan sosial semesta (pendalaman subsidi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pengangguran).

Reformasi Fiskal Dalam APBN 2015

Tanpa adanya reformasi fiskal, Pemerintah Jokowi-JK sulit untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi 7 persen karena postur APBN Tahun 2015 miskin stimulus dan beban subsidi yang besar. Salah satu reformasi fiskal yang bisa dilakukan pemerintah adalah realokasi anggaran subsidi BBM kepada belanja modal untuk infrastruktur. Kenaikan harga BBM bersubsidi memberikan ruang fiskal yang memadai sehingga ekspansi belanja pemerintah dapat

dilakukan melalui peningkatan belanja infrastruktur.

Bulan November 2014 ini adalah waktu yang tepat untuk mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM. Pengamat ekonomi berargumen bahwa inflasi September 2014 masih rendah yaitu sebesar 0,27 persen sehingga apabila BBM naik Rp3.000/liter akan memicu dampak langsung inflasi sebesar 1,7 persen dan inflasi tahun 2014 menjadi 8 persen. Meski inflasi akan naik tinggi akibat kenaikan harga BBM, inflasi di tahun berikutnya akan kembali turun. Kenaikan harga BBM yang bertahap tidak dianjurkan untuk dilakukan pemerintah karena justru akan memicu inflasi yang lebih tinggi. Secara psikologis industri akan menaikkan harga secara signifikan setiap ada kenaikan harga BBM.

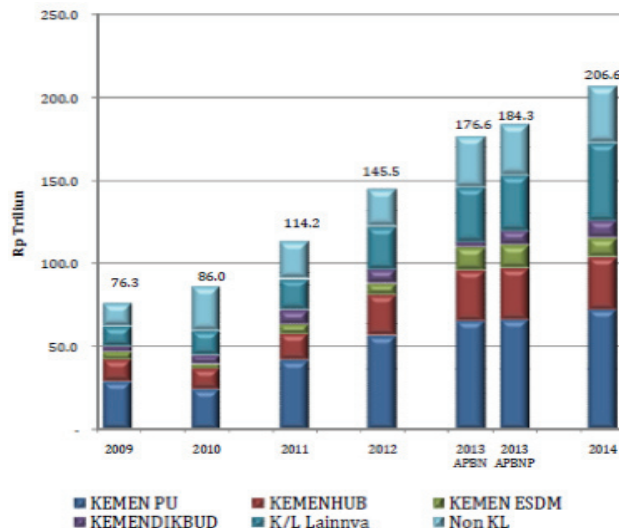
Bila dibandingkan dengan negara Malaysia dan Thailand, Indonesia masih jauh tertinggal dalam anggaran untuk fungsi ekonomi. Malaysia dan Thailand sudah di atas 20 persen dari total anggaran belanja, sementara di Indonesia masih berkisar 8-9 persen. Anggaran untuk fungsi ekonomi ini tercermin dari belanja modal, salah satunya untuk infrastruktur. Dengan adanya pengembangan infrastruktur diharapkan biaya logistik menurun sebesar 23,6 persen dari PDB.

Infrastruktur menjadi hal yang paling krusial untuk dibenahi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 serta berguna untuk investasi masa depan. Infrastruktur diperlukan untuk memperkuat basis manufaktur sehingga biaya logistik menurun sebesar 23,6 persen dari PDB. Infrastruktur mampu memperbaiki konektivitas antar wilayah dan antarpulau, mempercepat pemerataan pembangunan di daerah miskin dan tertinggal, meningkatkan daya saing, dan kapasitas produksi. Pemerintah perlu memperkuat program-program menyangkut pelayanan dasar masyarakat dan penguatan kapasitas ekonomi melalui penyediaan infrastruktur darat, laut, udara, listrik, dan energi.

Investasi infrastruktur di Indonesia membutuhkan investasi sebesar US\$450 miliar, tertinggi dibandingkan Thailand, Vietnam, Malaysia dan Philipina. Pagu infrastruktur APBN Tahun 2015 sebesar Rp196 triliun lebih kecil dibandingkan pagu infrastruktur APBN Tahun 2014 sebesar

Rp206,6 triliun, sementara kebutuhan anggaran infrastruktur APBN Tahun 2015 mencapai sekitar Rp320 triliun sebagaimana yang disajikan dalam gambar berikut.

Anggaran Infrastruktur Tahun 2009-2014



Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014.

Kebutuhan anggaran infrastruktur tersebut diperlukan untuk pembenahan infrastruktur perhubungan yang mendukung keterhubungan antar wilayah maka perlu pembangunan jalan baru sepanjang 240,94 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.471,2 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 11.716 meter dan pembangunan *flyover* atau *underpass* sepanjang 1.213,3 meter. Pembangunan 265 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda, serta pengadaan 48 unit lokomotif, kereta api diesel, kereta api listrik, trem dan *railbus*, serta pembangunan dua jembatan timbang dan pengembangan bus *rapid transit* sebanyak 50 unit. Pembangunan lima bandar udara baru, pengembangan dan rehabilitasi 51 bandar udara, serta pelayanan rute perintis sejumlah 145 rute dan pembangunan 59 prasarana dermaga penyeberangan, serta rehabilitasi pelabuhan perintis di 26 lokasi.

Untuk pembenahan infrastruktur energi sebagai upaya menunjang ketahanan energi maka perlu pembangunan jaringan transmisi, kapasitas gardu induk, serta kapasitas gardu distribusi dan penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan serta rakyat tidak mampu sebanyak 93.323 rumah tangga sasaran. Selain itu, untuk peningkatan produksi *lifting migas*,

jaringan gas pada dua kota, dan peningkatan rasio elektrifikasi hingga mencapai 83,18 persen.

Untuk penyediaan kebutuhan perumahan rakyat, perlu pembangunan 120 *twin block* rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan penyediaan sarana perumahan swadaya sebanyak 20 ribu unit.

Agar realisasi belanja infrastruktur lebih optimal, maka pemerintah perlu memperhatikan hal-hal berikut :

- (1) Belanja infrastruktur harus fokus dan mampu mendorong sektor lain untuk tumbuh, seperti untuk infrastruktur energi, pangan, dan konektivitas daerah.
- (2) Belanja infrastruktur harus efisien, artinya pengurangan porsi belanja yang digunakan untuk persiapan dan pengadaan, lebih besar porsi belanja pembangunan fisik.
- (3) Transparansi sehingga harus ada data yang jelas dan dipublikasikan dalam pembangunan infrastruktur.
- (4) Integrasi pemerintah dan swasta dalam skema *public-private partnership* hendaknya melibatkan swasta mulai dari perumusan program, penganggaran hingga penyediaan infrastruktur.

Penutup

APBN Tahun 2015 telah disahkan oleh Pemerintah SBY dan DPR periode 2009-2014. Anggaran subsidi energi pada APBN Tahun 2015 masih sangat besar, sementara anggaran belanja modal yang diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur mengalami penurunan dibandingkan pada APBN-P 2014.

Pemerintahan baru berkewajiban menjaga kesinambungan fiskal sehingga ekonomi nasional dapat terus tumbuh secara berkualitas. APBN 2015 yang masih bersifat *baseline* harus segera dilakukan perubahan agar memiliki ruang fiskal yang memadai dan nantinya berisikan pokok-pokok kebijakan dan alokasi belanja yang sesuai dengan program pembangunan yang direncanakan pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam pembahasan RAPBN-P 2015 nanti, DPR perlu memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan pemerintahan

Jokowi-JK dapat menciptakan stimulus bagi pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

Referensi

- Rancangan Undang-Undang APBN 2015.
Nota Keuangan dan UU APBN 2014.
Nota Keuangan dan UU APBN-P 2014.
T. Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
"Reformasi Fiskal Menjadi Prasyarat", *Kompas*, 30 September 2014.
"Berat, Capai Pertumbuhan 7%", *Neraca*, 30 September 2014.
"Inilah Empat Kebijakan Penting di APBN 2015", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a74f8e264e/inilah-empat-kebijakan-penting-di-apbn-2015>, diakses tanggal 1 Oktober 2014.
"APBN Raksasa, Stimulus Minim", http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/16/164721626/APBN.Raksasa.Stimulus.Minim?utm_source=bisniskeuangan&utm_medium=bp&utm_campaign=related&, diakses tanggal 2 Oktober 2014.
"Harga BBM naik 2015, Defisit APBN Jadi 1,5 Persen", <http://katadata.co.id/berita/2014/08/12/harga-bbm-naik-2015-defisit-apbn-jadi-15-persen>, diakses tanggal 1 Oktober 2014.
"Alokasi Dana Infrastruktur 2015 hanya Rp196T", <http://nasional.kontan.co.id/news/alokasi-dana-infrastruktur-2015-hanya-rp-196-t>, diakses tanggal 30 September 2014.